

## **Efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat (studi kasus di nagari maju dan nagari berkembang)**

*The effectiveness of community empowerment using village funds in Pasaman Barat District (case study in developed and developing village)*

**W B Pratama<sup>1</sup>, I W Syarfi<sup>2</sup>, dan Hasnah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas

<sup>2</sup>Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Corresponding author's email: irawahyunisyarfi@agr.unand.ac.id

**Abstrak.** Kebermanfaatan dana desa bagi masyarakat dapat dilihat dari efektifitas penggunaan dana desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap proses pemberdayaan masyarakat serta menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Metode yang digunakan adalah multi-kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan analisis kuantitatif untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa pada kedua nagari belum menunjukkan proses yang baik, dan efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masih belum efektif. Terdapat perbedaan tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat di antara kedua nagari yang diteliti yaitu nagari maju termasuk dalam kategori kurang efektif (37,4) dan nagari berkembang termasuk dalam kategori tidak efektif (31,6). Oleh karena itu, seluruh proses pemberdayaan harus melibatkan masyarakat serta peran pendamping desa juga harus ditingkatkan untuk memberi masyarakat nagari pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan pentingnya kegiatan pemberdayaan tersebut.

*Kata Kunci: Dana Desa; Evaluasi Keluaran; Partisipasi; Pembangunan Pedesaan*

**Abstract.** The impact of village funds for the community can be seen from the effectiveness of the use of village funds, especially for community empowerment programs. The purpose of this study was to reveal the process of community empowerment and to analyze community empowerment using village funds. The method used was a multi-case method. Data analysis was carried out using qualitative descriptive methods to determine the implementation of community empowerment, and quantitative analysis to determine the level of effectiveness of community empowerment. The results showed that the community empowerment process using village funds in the two villages had not been well, and the effectiveness of the community empowerment that has been carried out was still not effective. There are differences in the level of effectiveness of community empowerment between the two villages studied. The developed nagari was classified into the less effective category (37.4) and the developing nagari was classified into the ineffective category (31.6). Therefore, the entire empowerment process in the future must involve the community and the role of village assistants must also be increased to provide the village community with a better understanding of the purpose and importance of these empowerment activities.

*Keywords: Village Funds; Outcome Evaluation; Participation; Rural Development*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting, terutama di daerah pedesaan. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan di wilayah paling bawah, yakni pembangunan pedesaan. Menurut statistik tahun 2019, tingkat kemiskinan perkotaan adalah 6,69%, sedangkan tingkat kemiskinan pedesaan mencapai 12,85% [1]. Pemerintah telah memberikan perhatian besar pada pembangunan wilayah pedesaan dalam menangani ketimpangan tersebut, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [2]. Sehingga, pemerintah desa mempunyai kedudukan yang strategis dan menjadi strategi pembangunan baru, yang dulu desa hanya sebagai lokus, namun sekarang menjadi subjek pembangunan, ditambah dengan adanya dana desa, yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah desa.

Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk memberdayakan desa, terutama dalam mengelola dan mengatur prioritas pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang penggunaannya dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan [3]. Penggunaan dana desa pada bidang pembangunan adalah untuk membiayai pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial, dan sarana prasarana lingkungan. Akan tetapi, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat berdasarkan potensi dan sumberdaya lokal sehingga masyarakat mampu mandiri [4].

Penggunaan dana desa dapat digunakan secara fleksibel namun tetap diprioritaskan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, dapat dipahami bahwa dana desa dari APBN tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Dana desa akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang disepakati dan dituangkan dalam Musrenbang Desa serta dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar sejak mulai menyalurkan dana tersebut pada tahun 2015 untuk diberikan kepada desa. Diharapkan bahwa dana desa dapat mendorong lebih banyak pembangunan di tingkat desa, terutama untuk memungkinkan masyarakat desa untuk dapat membangun desa yang kuat, maju, dan mandiri. Dana desa sangat penting secara strategis dan menarik perhatian karena nilai nominalnya yang besar dan terus meningkat setiap tahun.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota, penerima dana desa di Sumatera Barat dan 19 nagari (desa) dari 11 kecamatan telah menerima dana tersebut. Alokasi penggunaan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Alokasi penggunaan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat.

Tahun Anggaran	Alokasi Dana Desa (dalam Rupiah)	Persentase Penggunaan Dana Desa	
		Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
2015	8.728.910.000	89%	11%
2016	19.617.110.000	84%	16%
2017	25.253.383.000	86%	14%
2018	35.839.479.000	79%	21%
2019	47.238.891.000	71%	29%

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa besaran proporsi dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 lebih dari 70% dari total penerimaan dana desa pada setiap tahunnya. Di sisi lain, besaran proporsi dana desa yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan kurang dari 30% dari total penerimaan dana desa setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penggunaan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak digunakan pada bidang pembangunan dibandingkan bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ditemukan bahwa dalam setiap prioritas terdapat kecenderungan untuk memfokuskan penggunaan dana desa lebih pada bidang pembangunan fisik daripada bidang pemberdayaan masyarakat, serta tidak ada kesinambungan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada tahun berikutnya. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbatas pada program-program yang telah dilaksanakan sehingga menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya indikasi masyarakat belum optimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta adanya indikasi lingkungan untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat belum berubah.

Hal serupa juga ditemukan pada penelitian efektivitas penggunaan dana desa bagi pembangunan nagari di Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan nagari sudah efektif. Namun, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program pemanfaatan dana desa, mengakibatkan penggunaan dana desa masih berfokus pada pembangunan fisik [5]. Penelitian terkait lainnya, yaitu efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tulamben Kabupaten Karangasem, juga ditemukan penggunaan dana desa yang masih terfokus pada pembangunan fisik, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat serta aparat desa tentang aturan penggunaan dana desa [6].

Menurut Pasal 7, kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga desa dapat memenuhi kebutuhan desanya secara mandiri dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta kesadaran, guna untuk membangkitkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi nagari [4].

Dana desa memiliki potensi yang besar dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan desa dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut juga dengan jumlah yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya, yang memungkinkan desa untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Klasifikasi status desa oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan gambaran percepatan pertumbuhan desa, yang ditetapkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan IDM 2020, terdapat 15 nagari dengan kategori maju dan 4 nagari lainnya dengan kategori berkembang di Kabupaten Pasaman Barat [7]. Nagari dengan kategori maju memiliki arti bahwa nagari tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang dimilikinya, seperti sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, sedangkan pada nagari kategori berkembang belum mengelolanya secara optimal. Adanya perbedaan latar belakang tersebut pada kedua kategori nagari, maka penting untuk melihat apakah adanya perbedaan pada nagari maju dan nagari berkembang dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.

Efektivitas dapat dikaitkan dengan pencapaian tujuan, yang berarti seberapa jauh rencana dapat dicapai dan dana desa dapat dialokasikan secara optimal kepada masyarakat. Efektivitas juga dapat menjadi ukuran apakah suatu program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa pada nagari maju dan berkembang di Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi multi-kasus (*multiple case study*) didukung dengan survei. Penelitian dilaksanakan di Nagari Sungai Aua (nagari maju) dan Nagari Parik (nagari berkembang), Kabupaten Pasaman Barat dari bulan April-Juni 2021. Data dikumpulkan

dari wawancara mendalam dengan informan kunci sebanyak 8 orang, yakni Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pelayanan, serta Pendamping Desa pada masing-masing nagari dan sampel dengan kuesioner terhadap 70 orang, yakni masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan yang didanai oleh dana desa pada tahun 2015-2019 di nagari maju maupun nagari berkembang.

Tujuan pertama penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari proses yang dilakukan. Program dikatakan baik apabila dilakukan dengan baik dan benar. Jika proses telah dilakukan dengan baik maka juga akan memberikan hasil yang baik, yaitu tercapainya tujuan dari program tersebut. Maka dari itu penting untuk melihat apakah proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut telah memfasilitasi untuk memperbaiki tingkat keberdayaan masyarakat nagari. Variabel yang diamati untuk tujuan pertama, dilihat berdasarkan aspek-aspek; (1) Proses menentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; (3) Dampak kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat; (4) Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kedua penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa. Variabel yang digunakan untuk tujuan kedua adalah dilakukan dengan melakukan evaluasi keluaran (*outcome*), yaitu mengukur dan menilai akibat atau pengaruh dari suatu program [8]. Pada penelitian ini digunakan untuk melihat dampak atau pengaruh dari program setelah serangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan indikator, seperti pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** Indikator dari variabel evaluasi keluaran.

Variabel	Indikator
Evaluasi Keluaran	1. Kesadaran masyarakat
	2. Partisipasi masyarakat
	3. Kemandirian masyarakat
	4. Pendapatan masyarakat

Analisis data untuk tujuan pertama adalah analisis deskriptif, yaitu analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data untuk tujuan kedua dilakukan dengan pemberian pengkodean (*coding*) sebagai indikasi atau klasifikasi jawaban dari kuesioner dengan format tipe likert sebagai berikut (Tabel 3):

**Tabel 3.** Coding jawaban angket mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.

Coding	Keterangan	Artinya
3	Setuju	Responden setuju dengan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.
2	Ragu-Ragu	Responden ragu-ragu dengan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.
1	Tidak Setuju	Responden tidak setuju dengan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.

Selanjutnya untuk tujuan kedua digunakan tiga kategori dengan skala skor menggunakan rumus [9], sebagai berikut:

$$Interval (I) = \frac{Skor Tertinggi - Skor Terendah}{Banyak Kelas}$$

Kriteria dalam pengukuran efektivitas pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa pada nagari maju maupun nagari berkembang di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Kriteria mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.

Aspek Pengukuran	Skor	Kategori
1. Kesadaran masyarakat (4 Pernyataan)	> 9,4 – 12	Efektif
	> 6,7 – 9,4	Kurang Efektif
	4 – 6,7	Tidak Efektif
2. Partisipasi masyarakat (5 Pernyataan)	> 11,6 – 15	Efektif
	> 8,3 – 11,6	Kurang Efektif
	5 – 8,3	Tidak Efektif
3. Kemandirian masyarakat (7 Pernyataan)	> 16,4 – 21	Efektif
	> 11,7 – 16,4	Kurang Efektif
	7 – 11,7	Tidak Efektif
4. Pendapatan masyarakat (3 Pernyataan)	> 7 – 9	Efektif
	> 5 – 7	Kurang Efektif
	3 – 5	Tidak Efektif
5. Efektivitas dalam aspek kesadaran, partisipasi, kemandirian, dan pendapatan masyarakat (19 Pernyataan)	> 44,4 – 57	Efektif
	> 31,7 – 44,4	Kurang Efektif
	19 – 31,7	Tidak Efektif

### 3. Hasil penelitian dan pembahasan

#### 3.1. Realisasi penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa yang berupaya untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah nagari telah berupaya mewujudkan hal tersebut dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Besarnya pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5.** Realisasi penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Tahun	Nagari Maju			Nagari Berkembang		
	Dana Pemberdayaan Masyarakat	Persen (%)	Total Penerimaan Dana Desa	Dana Pemberdayaan Masyarakat	Persen (%)	Total Penerimaan Dana Desa
2015	-	-	496.714.043	25.000.000	5,2	479.729.744
2016	-	-	1.411.483.240	105.005.961	8,5	1.238.895.960
2017	451.434.000	24,8	1.823.285.238	210.000.000	13,1	1.598.259.246
2018	34.210.000	1,2	2.860.757.000	178.399.372	8,2	2.175.048.000
2019	43.650.000	1,1	3.896.769.000	138.050.000	4,7	2.962.981.000
Rata-rata	176.431.333	5,4	2.097.801.704	131.291.067	7,9	1.690.982.790

Pada kedua nagari terlihat bahwa adanya kecenderungan penurunan persentase pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Namun persentase pengalokasian dana desa pada nagari berkembang lebih tinggi dibandingkan nagari maju. Persentase pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di nagari berkembang pada setiap tahunnya selain pada tahun 2017 selalu lebih tinggi dibandingkan nagari maju. Selain itu nagari berkembang sudah terlebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari persentase rata-rata penggunaan dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 5 tahun (2015-2019) pada kedua nagari hanya kurang dari 10%, dengan persentase rata-rata pada nagari maju adalah 5,4%, sedangkan nagari berkembang adalah 7,9%. Rendahnya pengalokasian tersebut dikarenakan masih tingginya permintaan dari masyarakat nagari untuk lebih melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur), sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat terabaikan dan selain itu juga tidak adanya peraturan yang mengatur dengan jelas besaran dana desa yang diwajibkan untuk digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

#### 3.2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa

**3.2.1 Proses menentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.** Proses menentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kedua nagari berpedoman kepada Permendes serta Peraturan

Bupati Pasaman Barat sebagai petunjuk teknis. Namun belum adanya peraturan maupun petunjuk teknis terkait ketentuan dalam penetapan besaran dana desa yang harus dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman yang tidak seragam terkait besaran penyaluran dana desa tersebut, menjadi penyebab sulitnya aparaturnagari dalam menetapkan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan. Selain itu masyarakat selalu lebih memprioritaskan kegiatan pada bidang pembangunan (sarana dan prasarana) dan belum adanya upaya pemerintah nagari untuk mengatasi keadaan tersebut, sehingga ini terus berlanjut untuk setiap tahunnya. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak diawali dengan pemberian sosialisasi. Kegiatan sosialisasi di nagari berkembang diberikan kepada masyarakat setelah pemerintah nagari merencanakan serta menyusun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan pada tahun anggaran. Sebaliknya, pada nagari maju sosialisasi diberikan setelah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan. Hal ini tentunya sangat disayangkan Karena kegiatan pemberdayaan masyarakat seharusnya merupakan usulan berdasarkan kebutuhan masyarakat nagari dan pemerintah nagari memberikan kesempatan dan pemahaman kepada masyarakat nagari dalam memaknai pembangunan dalam penggunaan dana desa. Jika masyarakat tidak diberi kewenangan dalam proses mengambil keputusan dan perencanaan di tingkat masyarakat, maka program pembangunan yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan perencanaan akan memiliki relevansi yang kecil karena tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika hasil dari berbagai program tersebut tidak mempengaruhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat [10].

*3.2.2 Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.* Kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa di nagari maju dan berkembang tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat nagari. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan daya tampung ruang pertemuan kantor wali nagari yang dijadikan ruang pelatihan tidak memadai. Dikarenakan masyarakat yang ikut serta dalam pemberdayaan akan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah nagari untuk setiap kegiatannya maka yang menjadi sasaran program atau masyarakat yang diutamakan untuk ikut serta pada kegiatan pemberdayaan di nagari berkembang adalah perempuan atau ibu rumah tangga serta masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sedangkan di nagari maju kegiatan pemberdayaan tidak hanya diberikan pada perempuan atau ibu rumah tangga maupun masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, namun juga kepada masyarakat yang berminat dan memiliki keinginan belajar untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebanyak kurang lebih 4 kali pertemuan. Pelatihan tersebut diberikan oleh instansi atau dinas-dinas yang berkompeten dibidangnya dari kecamatan ataupun kabupaten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Metode pelatihan dilakukan dengan menyampaikan konsep yang bersifat teoritis dan mengikut sertakan secara aktif masyarakat untuk mempraktikkan kegiatan tersebut. Diharapkan masyarakat dapat mempraktikkan dan menjadikannya sebagai kegiatan untuk menambah pendapatan sehari-hari.

*3.2.3 Dampak kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat.* Keberhasilan pencapaian sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Namun nyatanya, kegiatan pemberdayaan masyarakat di kedua nagari tersebut hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Banyak masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat, tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan selama pelatihan diberikan masyarakat telah terbiasa disediakan kebutuhannya oleh pemerintah nagari, seperti tersedianya alat dan bahan untuk dipraktikkan selama pelatihan, diberikan biaya konsumsi dan juga transportasi selama kegiatan pelatihan berlangsung, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang ingin terus dibantu permodalannya untuk melakukan kegiatan secara mandiri setelah pelatihan selesai, sedangkan pemerintah nagari memiliki keterbatasan anggaran. Seharusnya adanya dana desa dapat membuat masyarakat menjadi berdaya sebagaimana dari tujuan dana desa itu sendiri, sehingga hal ini dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

*3.2.4 Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.* Salah satu bagian penting dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Namun pada akhir kegiatan pemberdayaan masyarakat baik pada nagari maju maupun berkembang tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Hal inilah yang mengakibatkan banyak program pemberdayaan masyarakat hanya dilakukan sebatas program telah terlaksana. Informan kunci menyadari bahwa setelah adanya pelatihan diberikan kepada masyarakat seharusnya ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut, yaitu berupa evaluasi yang mencakup seluruh tahapan proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta dampak atau pengaruh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga pemerintah nagari mengetahui faktor-faktor atau kendala yang mempengaruhi kegiatan tersebut, namun sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindakan untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu berubah-ubah pada setiap tahunnya. Keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah nagari. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan rangkaian proses yang panjang (tidak langsung terjadi). Jika pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terus menerus, pengaruh yang ditimbulkan akan semakin kuat seiring waktu, dan ketika pengaruh telah cukup kuat, diharapkan dapat terjadi proses menggelling dengan sendirinya [11].

### *3.3. Efektivitas pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa*

Analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat pada nagari maju dan berkembang ditentukan berdasarkan jawaban responden, yaitu persepsi sudut pandang masyarakat saat berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa yang dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019. Efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa di kedua nagari penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6.** Rata-Rata Skor Efektivitas pemberdayaan Masyarakat Menggunakan Dana Desa.

Aspek Pengukuran	Rata-Rata Skor Nagari Maju	Kriteria	Rata-Rata Skor Nagari Berkembang	Kriteria
1. Kesadaran masyarakat	8,4	Kurang Efektif	7,7	Kurang Efektif
2. Partisipasi masyarakat	13	Efektif	10,5	Kurang Efektif
3. Kemandirian masyarakat	12	Kurang Efektif	10,1	Tidak Efektif
4. Pendapatan masyarakat	4	Tidak Efektif	3,3	Tidak Efektif
Total	37,4	Kurang Efektif	31,6	Tidak Efektif

Pada dua nagari yang menjadi studi penelitian, terdapat perbedaan efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa (Tabel 6). Walaupun jumlah dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di nagari maju lebih kecil dibandingkan nagari berkembang dan baru memulai kegiatan tersebut dari tahun 2017, akan tetapi menurut responden nagari maju dari 19 pernyataan yang ditanggapi responden dalam kuisisioner diperoleh sebesar 37,4. Berdasarkan Tabel 4 skor 37,4 menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan menggunakan dana desa termasuk dalam kriteria kurang efektif, yaitu satu tingkat lebih tinggi dibandingkan nagari berkembang. Terutama dalam hal partisipasi masyarakat, nagari maju memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi (rata-rata skor 13) dibandingkan dengan nagari berkembang (rata-rata skor 10,5). Terlihat dari tingginya kemauan responden untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan dari kegiatan pemberdayaan untuk di praktikkan. Hal ini didukung oleh proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di nagari maju yang tidak hanya diberikan kepada perempuan ataupun ibu rumah tangga, tetapi juga berlaku terutama bagi masyarakat yang ingin belajar dan berpartisipasi. Sehingga lebih mendorong masyarakat untuk dapat melanjutkan kegiatan tersebut setelah adanya pelatihan. Selain itu pemerintah nagari mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan agar masyarakat nagari lainnya dapat belajar dari masyarakat yang telah mengikuti pelatihan atau kepada masyarakat yang tetap melakukan kegiatan setelah adanya pelatihan, sehingga masyarakat nagari dapat melihat contoh nyata dari masyarakat yang berhasil untuk mempraktikkan pelatihan tersebut. Walaupun jumlah tersebut tidak sebanyak dari total masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun sayangnya pemerintah nagari tidak melakukan pendataan dan evaluasi maupun tindak lanjut bagi masyarakat yang tetap dan berhasil melanjutkan dan menerapkan hasil dari pelatihan yang diberikan.

Sebaliknya, pada nagari berkembang yang besaran alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaannya lebih besar dari nagari maju dan telah melakukan kegiatan tersebut dari tahun 2015, akan tetapi menurut responden nagari berkembang dari 19 pernyataan yang ditanggapi responden dalam kuisisioner diperoleh skor sebesar 31,6. Berdasarkan Tabel 4 skor 31,6 menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan menggunakan dana desa termasuk dalam kriteria tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terutama pada keinginan responden untuk

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan dari kegiatan pemberdayaan untuk dipraktikkan, ini disebabkan karena belum adanya contoh nyata di masyarakat yang mempraktikkan kegiatan tersebut. Sehingga hasrat, dorongan maupun minat masyarakat lainnya untuk mempraktikkan juga menjadi rendah.

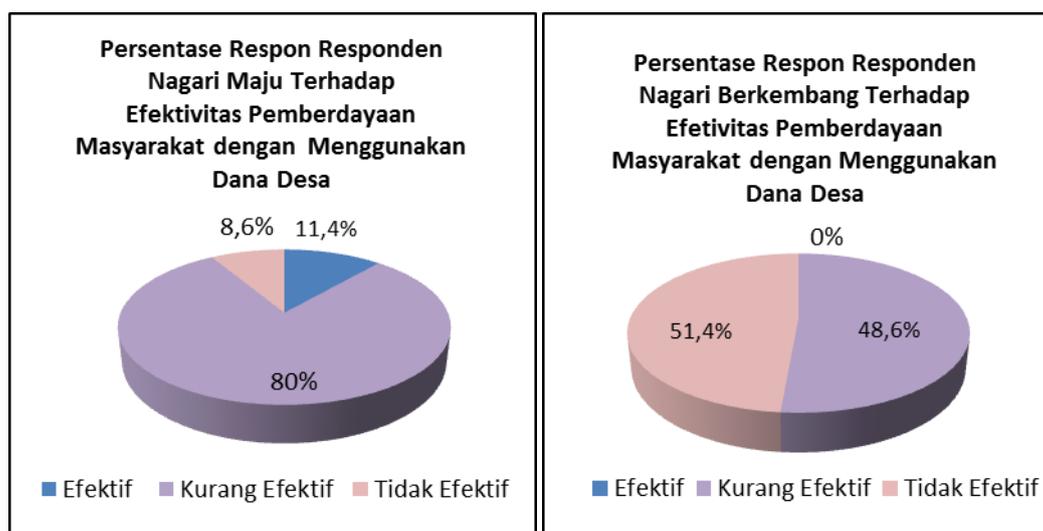
Selain itu status IDM juga mempengaruhi pada kedua nagari, seperti nagari dengan kategori maju diartikan telah memiliki potensi serta kemampuan untuk mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Akan tetapi, pada nagari dengan kategori berkembang juga memiliki potensi tersebut, namun belum dikelola secara optimal. Sehingga efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa pada nagari maju dapat dilakukan lebih baik dibandingkan nagari berkembang.

Pemberdayaan, berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, guna memberikan persiapan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereka, sehingga dapat menentukan masa depannya serta mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri [12]. Pemberdayaan bertujuan untuk membangun kemandirian individu dan masyarakat. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami oleh suatu masyarakat, yang dicirikan oleh kemampuannya untuk berpikir, memutuskan dan melakukan apa yang dianggapnya sesuai untuk menggunakan kapasitasnya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya [13]. Namun jika dilihat secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat dengan dana desa pada nagari maju dan berkembang di Kabupaten Pasaman Barat masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya responden yang tidak mengetahui dan menyadari tujuan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pentingnya kegiatan tersebut bagi masyarakat nagari. Dalam pemberdayaan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berarti masyarakat menyadari serta memahami bahwa mereka memiliki masalah yang harus dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai, serta merupakan upaya untuk menumbuhkan keinginan perubahan dan perbaikan dalam diri individu maupun masyarakat. Tanpa keinginan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, setiap upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat tidak akan mendapat perhatian, simpati atau partisipasi dari masyarakat. Artinya jika masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka upaya pemberdayaan tidak akan berhasil.

Selain itu dalam proses penyusunan dan penetapan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak melibatkan masyarakat nagari secara aktif. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga proses melalui partisipasi yang tinggi, berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat. Prinsip yang disampaikan dalam proses pemberdayaan adalah memberikan kesempatan masyarakat untuk memutuskan apa yang diinginkannya sesuai dengan kehendak, pengetahuan, dan kemampuannya [11]. Jika pemberdayaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut serta dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Sehingga keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa dapat tercapai. Selanjutnya hal ini berdampak pada tidak terwujudnya kemandirian masyarakat yang menjadi tujuan dari

pemberdayaan masyarakat. Partisipasi adalah kunci untuk terwujudnya kemandirian pada masyarakat. Jika seseorang mengetahui dan memahami bahwa suatu program dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka akan lebih tertarik untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, masyarakat sejak awal harus dilibatkan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan dan memotivasi mereka untuk melanjutkan serta mengembangkannya. Selain itu masyarakat juga telah terbiasa segala sesuatunya diatur oleh pemerintah nagari dan masyarakat nagari hanya siap menerima keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari tersebut. Namun setelah pelatihan diberikan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah nagari. Hal inilah yang mengakibatkan tidak terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat karena masyarakat tidak melanjutkan pelatihan yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa hanya sebatas program telah terlaksana dan tidak memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat nagari.

Jika dilihat dari hasil jawaban kuesioner pada masing-masing responden di nagari maju dan nagari berkembang, persentase respon responden terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa pada nagari maju maupun nagari berkembang di Kabupaten Pasaman Barat terlihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Persentase respon responden terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Gambar 1 pada nagari maju, dari 19 pernyataan dalam kuesioner yang ditanggapi responden diperoleh 11,4% responden menyatakan efektif, 80% responden menyatakan kurang efektif, dan 8,6% responden lainnya menyatakan tidak efektif. Hal ini menandakan bahwa dari 35 responden pada nagari maju, 28 orang atau 80% menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa masih kurang efektif. Akan tetapi, pada nagari berkembang dari 19 pernyataan dalam kuesioner yang ditanggapi responden diperoleh 48,6% responden menyatakan kurang efektif, 51,4% lainnya menyatakan tidak efektif dan

tidak ada responden yang menyatakan efektif. Hal ini menandakan bahwa dari 35 responden pada nagari berkembang, 17 orang atau 48,6% menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa masih kurang efektif dan 18 orang atau 51,4% lainnya menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa tidak efektif.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa pada nagari maju dan berkembang di Pasaman Barat sama-sama belum terlihat proses pemberdayaan masyarakat yang baik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat nagari belum dilibatkan dalam menentukan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Sehingga mengakibatkan banyak masyarakat tidak memahami tujuan serta pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibatasi hanya sejauh program telah dilaksanakan.

Selain itu efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa pada nagari maju dan berkembang di Pasaman Barat juga masih belum efektif. Terdapat perbedaan tingkat efektivitas di kedua nagari tersebut, sebagian besar masyarakat nagari maju (80%) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa termasuk dalam kategori kurang efektif. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat nagari berkembang (51,4%) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa berada termasuk dalam kategori tidak efektif.

Dengan demikian, masyarakat harus terlibat dalam keseluruhan proses pemberdayaan. Terutama dalam merumuskan masalah yang memerlukan kegiatan pemberdayaan, menetapkan tujuan serta menyusun rencana kegiatan tersebut. Selain itu, peran pendamping desa perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan serta pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, sehingga pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa dapat lebih efektif, dan juga berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### Referensi

- [1] Kemiskinan P, Maret I. STATISTIK Profil Kemiskinan di 2018:1–8.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa n.d.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. n.d.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. n.d.
- [5] Syarfi IW, Noer M, Azhari R. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan. *J Sos Soedirman* 2019;3:40–8.
- [6] IMAS Prayoga, Deti Mulyati HR. Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *J Ilm Adm Pemerintah Drh* 2020;12:42–57.

- [7] Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan T. Indeks Desa Membangun n.d. [https://idm.kemendesa.go.id/index.php/idm\\_data](https://idm.kemendesa.go.id/index.php/idm_data).
- [8] Wirawan. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press; 2011.
- [9] Riduwan, Warsiman. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta; 2008.
- [10] Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2011.
- [11] Huraerah A. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora; 2008.
- [12] Ife J. Community Development: Creating Community Alternatives: Vision, Analysis, and Practice. Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd; 1995.
- [13] Sulistiyani AT. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media; 2017.